



KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK BEKERJASAMA DENGAN IRAN DI BAWAH KESEPAKATAN SANKSI KEPEMILIKAN NUKLIR *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION*

Silviana Iskandar

Departemen Hubungan International, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang.

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

China still intends to work with Iran despite the restrictions placed on it as a result of the nuclear deal or the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). More than three decades of cooperation between China and Iran have improved the two nations' mutually beneficial relationship. Iran also holds a significant position for China as a supplier of oil and energy. This study employs qualitative research techniques for descriptive analysis and discovers that China's national interests, particularly in the economic and security sectors against Iran stands, are the reason why China continues to cooperate with Iran despite being subject to the JCPOA's sanction provisions. China has a national interest in the Iranian state in this sense, despite the JCPOA's sanctions against Iran. Iran sees China as a partner for long-term economic cooperation in the sector of energy exports since China is a nation that depends on oil exports as a source of revenue. This study examines China's foreign policy toward Iran, which is subject to the JCPOA's nuclear property sanctions, using a national interest framework.

Keywords: *National Interest, Nuclear Deal, Joint Comprehensive Plan of Action, China-Iran Partnership, Sanction*

PENDAHULUAN

Hubungan internasional dinyatakan sebagai ‘anarki’, jika melihat dalam perspektif Realisme. Hal ini karena aktor dalam hubungan internasional cenderung bersikap ingin

memiliki kekuasaan penuh terhadap negaranya, dan melakukan ekspansi atas kekuasaan tersebut ke wilayah lain. Sanksi dalam hubungan internasional merupakan alat yang digunakan negara dan NGO (*Non-Governmental Organization*) untuk mempengaruhi atau menghukum negara lain atau aktor non-negara lainnya. Sebagian besar sanksi bersifat ekonomi, tetapi juga dapat membawa ancaman konsekuensi diplomatik atau militer. Sanksi bisa sepihak, artinya hanya dikenakan oleh satu negara, atau bilateral, artinya blok negara (seperti kelompok perdagangan internasional) memberlakukan hukuman kepada negara lain (Kolodkin, 2019).

Sanksi ialah bentuk kekuatan politik internasional dan juga menjadi instrumen untuk menimbulkan kerugian bagi negara lain dalam bidang ekonomi (Brzoska, 2014). Dalam penetapan sanksi, negara cenderung berperan sebagai sebagai aktor atau pemberi sanksi, dan juga sebagai yang diberi sanksi. Sanksi dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek di sebuah negara. Salah satu sanksi yang kerap kali dilakukan dalam politik internasional adalah sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi bersifat sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau rezim internasional untuk memaksa atau mempengaruhi sebuah negara lain, entitas, atau individu untuk mengubah kebijakan atau bahkan pemerintahnya (Carter, 2011).

Berdasarkan dengan asumsi bahwa nuklir Iran dapat mengancam stabilitas dan keamanan internasional, pada tahun 2015 enam negara besar yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Tiongkok, dan Jerman dengan Iran membuat kesepakatan nuklir yang bernama Kesepakatan Nuklir Iran atau yang lebih dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan ini dibuat oleh karena tindakan Iran yang telah menyalahgunakan program pengembangan nuklirnya dengan tujuan sebagai senjata pemusnah massal (Nainggolan, 2015).

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama tahun 2015 saat itu berhasil membawa Iran beserta Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman pada perundingan atas kepemilikan senjata nuklir Iran. Pertemuan ketujuh negara ini menghasilkan JCPOA atau Kesepakatan Nuklir Iran. Atas dasar tersebut, negara-negara Barat yang tergabung dalam JCPOA memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran dengan harapan dapat memperlemah posisi Iran sehingga tidak melanjutkan program senjata nuklirnya. Sanksi tersebut berhasil untuk melemahkan perekonomian Iran namun tidak dengan pemerintahnya.

Pemerintah Iran masih bersikeras akan pengembangan pengayaan uraniumnya tersebut (Saïd, 2016). Namun hal berbeda terjadi dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Amerika Serikat membawa pandangan serta kebijakan luar negeri baru terkait isu nuklir Iran tersebut. Pada 8 Mei 2018, Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran (Landler, 2018). Sanksi Amerika Serikat di sini mencakup pengiriman (*shipping*), pembuatan kapal, keuangan, dan energi. Terdapat lebih dari 700 individu, entitas, kapal dan pesawat telah masuk ke dalam daftar sanksi, termasuk bank-bank besar, eksportir minyak dan perusahaan pelayaran (BBC, 2018).

JCPOA dibentuk sebagai kesepakatan enam negara kepada Iran, menjatuhkan sanksi untuk memberi tekanan pada pemerintah Iran agar menghentikan pengembangan nuklirnya. Namun dalam perjalanannya, nyatanya tidak semua negara menerapkan sanksi ekonomi tersebut secara keseluruhan pada Iran. Tiongkok merupakan satu dari enam negara yang ikut dalam Kesepakatan Nuklir Iran, serta menjadi salah satu mitra kerjasama Iran terbesar dalam hal perdagangan bersama dengan Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa (Commision, 2020). Selama adanya perjanjian JCPOA, Tiongkok terus memberikan pernyataan untuk menegakkan kesepakatan dengan Iran (Yulianti, 2018). Tiongkok juga tetap akan melanjutkan perdagangan dengan Iran meskipun akan rentan dengan sanksi Amerika Serikat. Dari tahun 2017 hingga September 2018, Tiongkok telah mengimpor 630.000 barel per hari (bpd) dari Iran (Katz, 2019).

Tiongkok ikut memberikan sanksi kepada Iran melalui keterlibatannya dalam JCPOA namun dibalik itu, Tiongkok juga memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan internasional dengan Iran. Maka dari itu, Tiongkok berupaya untuk tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa dengan Iran, serta menjadi mediator bagi Iran dan negara lain yang tergabung dalam JCPOA untuk mencapai kesepakatan mengenai kepemilikan nuklir Iran. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan mengapa Tiongkok tetap melakukan hubungan bilateral dengan Iran meskipun Iran tengah berada dibawah *smart sanction* dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Mengapa Tiongkok tetap melakukan hubungan bilateral; dengan Iran meskipun Iran tengah berada di bawah *smart sanction* dalam *Joint Comprehensive***

Plan of Action (JCPOA)?” Adapun argumen dari penelitian ini yaitu untuk menjabarkan aspek ekonomi dan aspek keamanan yang menjadi landasan kepentingan Tiongkok di dalam menjalin kerjasama dengan Iran ketika Iran berada di bawah sanksi dari JCPOA terkait dengan kepemilikan nuklir. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yakni teori kepentingan nasional yang dipaparkan oleh Charles Chong-nam Wu.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai peran Tiongkok di dalam JCPOA. Adapun contoh penelitian terdahulu yang dilakukan Tiongkok, antara lain:

Pada penelitian yang berjudul *“Becoming a ‘Responsible Power’?: China’s New Role during the JCPOA Negotiations”* oleh Daniel Johanson (2019) menyatakan bahwa meskipun sistem politik Beijing dan Teheran agak bertentangan, namun hubungan kedua negara memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Ketika peran Iran di kawasan MENA (*Middle East and North Africa*) menjadi lebih kuat, Iran juga menjadi sumber pasokan minyak vital yang signifikan untuk mendorong ekonomi Tiongkok. Penelitian yang kedua berjudul *“Posing Problems Without an Alliance: China-Iran Relations after the Nuclear Deal”* yang ditulis oleh Joel Wuthnow (2016) menjelaskan bahwa meskipun JCPOA akan memfasilitasi hubungan yang lebih erat antara Tiongkok dan Iran di beberapa sektor, hubungan antara keduanya akan tetap terkendala oleh beberapa isu. Tiongkok perlu menyeimbangkan hubungannya dengan Iran dan hubungannya dengan Amerika Serikat dan negara lainnya di kawasan yang memiliki hubungan buruk dengan Iran, seperti Arab Saudi, Israel, dan Turki, untuk melindungi risiko geopolitiknya dan menghindari ketergantungan yang berlebihan pada Iran sebagai mitra energi, dan mewujudkan keinginan dasarnya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pada penelitian ketiga yang berjudul *“Strategi Soft Power dalam Ekspansi Ekonomi China di Timur Tengah: Studi Kasus Kerjasama China-Iran”* ditulis oleh Dina Yulianti dan R. Muhammad Teguh Nurhasan Affandi (2018) menyatakan bahwa beberapa negara lain seperti India dan Korea Selatan menghentikan impor minyak dari Iran karena adanya ancaman sanksi dari AS, namun Tiongkok tidak bergeming. Secara umum, dengan posisi geostrategis yang dimiliki Iran, sumber daya migas yang sangat kaya, serta populasi yang cukup tinggi (lebih dari 78 juta),

menjadikan Iran sebagai partner ekonomi dan politik yang sangat penting bagi Tiongkok. Selain itu, dengan posisi Iran sebagai distraksi utama bagi AS, posisi Tiongkok akan lebih aman.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dilihat bahwa sikap Tiongkok terhadap negara Iran dalam kesepakatan JCPOA memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri. Kepentingan secara geopolitik, kepentingan ekonomi, dan membangun citra sebagai '*responsible power*' di kawasan Timur Tengah menjadi tujuan bagi Tiongkok menjalankan kerja sama dengan Iran, meskipun Amerika Serikat memberi ancaman dan menetapkan sanksi ekonomi bagi Iran. penelitian ini ingin membahas lebih lanjut mengenai alasan Tiongkok yang bergabung dalam JCPOA untuk memberi sanksi ekonomi, namun dalam perjalanannya Tiongkok juga mempertahankan hubungan bilateralnya dan mendukung Iran melalui perdagangan bisnis di negara tersebut melalui judul penelitian "Kepentingan Negara Tiongkok terhadap Iran mengenai Sanksi Ekonomi dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)".

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep utama dan paling mendasar di dalam analisa disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Pada umumnya, konsep kepentingan nasional ini sendiri melekat kepada paradigma realis, di mana realis selalu mengedepankan kepentingan nasional dan bagaimana kepentingan nasional ini dicapai oleh negara sebagai *unitary actor* yang diakui oleh realis. Seperti yang diketahui, bahwa realisme merupakan paradigma atau teori yang dominan di dalam Hubungan Internasional. Sampai batas tertentu, praktik politik internasional pada saat ini masih berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip realisme. Aktor negara, persaingan kekuasaan, strategi swadaya, kepentingan nasional, kekacauan dunia, dan keseimbangan kekuasaan tetap menjadi aspek penting dalam politik internasional. Oleh karena itu, realisme merupakan pusat politik internasional baik secara teoritis atau pun praktis (Dunne & Schmidt, 2005).

Realis berpendapat bahwa negara selalu terlibat dalam persaingan kekuasaan sebagai akibat dari keinginan untuk bertahan dan mendominasi negara lain. Morgenthau dalam *Politics Among Nations* (1948 dalam 56 Pham, 2015) berpendapat bahwa kepentingan adalah jantung dari semua aktivitas politik. Dengan demikian dalam dunia internasional, setiap negara harus mencapai kepentingan nasionalnya, yang secara umum didefinisikan sebagai

kekuasaan (*power*) (Pham, 2015). Bagi kaum realis, inti dari kepentingan nasional dari semua negara adalah kemampuan untuk *survive* karena kepentingan lain seperti ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan tidak dapat tercapai jika keberadaan negara terancam (Manan, 2015).

Dalam kerangka yang dijabarkan Morgenthau, setiap tindakan politik diarahkan untuk mempertahankan, meningkatkan, atau mendemonstrasikan kekuasaan negaranya. Morgenthau berpendapat bahwa secara tradisional terdapat dua sarana yang dapat mempertahankan 'order' atau ketertiban. Yang pertama adalah perimbangan kekuasaan atau yang sering disebut sebagai *Balance of Power*, yang dicapai melalui perebutan kekuasaan (*struggle for power*), dan jalan yang kedua yaitu batas-batas normatif yang diberlakukan oleh hukum internasional, moralitas, dan opini publik (Pham, 2015).

Mempelajari kepentingan sebuah negara lebih bertujuan untuk memahami hasil dari perilaku negara tersebut. Ada risiko dalam menilai kepentingan negara melalui perilakunya sebab, apabila negara bertindak berdasarkan kepentingan bukan berarti negara selalu mengejar pilihan pertama dan juga bukan berarti negara akan berakhir dengan pilihan terakhir mereka. Negara akan memilih kebijakan yang diharapkan dapat membawa nilai guna yang positif (Wu, 2017). Peningkatan keterlibatan ekonomi antar negara mengarah pada tatanan internasional yang lebih damai yang menghalangi negara-negara dengan tipe rezim yang berbeda dari ekspansi militer (Mousseau 2003; Souva dan Prins 2006 dalam Wu, 2017). Wu (2017) menyatakan bahwa nilai-nilai inti kepentingan nasional dapat dijelaskan oleh tiga jenis kategori yang berbeda yakni keamanan (*security*), komunitas (*community*), dan ekonomi (*economic*).

Negara memiliki porsi dan perhatian yang berbeda dalam setiap aspek kepentingan nasional ini, dan hal tersebut merupakan determinan dari kepentingan nasional tertentu seperti pengembangan/perluasan kemampuan nasional, kepemilikan senjata nuklir, tipe rezim, pembangunan ekonomi nasional, keterbukaan pasar, dan investasi asing langsung. Hal ini juga mempengaruhi struktur hierarkis dalam sistem kepercayaan semua negara dalam membuat keputusan tentang kebijakan luar negeri (*foreign policy*) (Wu, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatori. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apa alasan Tiongkok tetap menjalin kerjasama dengan Iran yang dijatuhkan sanksi ekonomi atau *smart sanction* dari Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 – 2019, dan penelitian ini menjelaskan sebab dan akibat dari keterkaitan *smart sanction* terhadap hubungan bilateral dua negara yakni Iran dan Tiongkok.

PEMBAHASAN

Pembentukan JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang biasa disebut sebagai Kesepakatan Nuklir Iran (*Iran Deal*), ditandatangani di Wina pada 14 Juli 2015, oleh anggota Dewan Keamanan ditambah Jerman, Iran, dan Uni Eropa (P5+1). Tujuan utama dari kesepakatan JCPOA adalah untuk mengurangi program nuklir Iran yang menjauhkannya dari persenjataan nuklir. JCPOA terutama berkisar pada persediaan dan pengayaan uranium Iran. Secara khusus, Iran diharuskan untuk meninggalkan 97% uranium yang diperkaya dan diizinkan pengayaan hanya hingga 3,67%, yang kurang dari yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian medis (20%) atau untuk produksi senjata (90%) (The Obama White House, 2015 dalam Maioli, 2021).

JCPOA adalah produk dari upaya internasional yang berlarut-larut untuk memaksakan pengawasan dan pembatasan dari program nuklir Iran. Akar dari sejarah JCPOA ini adalah ketika Iran memulai program nuklirnya pada 1950-an dengan bantuan Amerika Serikat, dan di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Shah. Sebelum mengalami revolusi, Iran telah menandatangani *non-proliferation treaty* (NPT) pada tahun 1970 dan memulai sejumlah kontrak terkait nuklir, seperti pembangunan reaktor nuklir Bushehr. Namun, proyek-proyek ini kemudian diberhentikan setelah revolusi pada tahun 1979 (Vakil & Quilliam, 2019).

JCPOA memiliki poin-poin dalam perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan nuklir Iran ini, antara lain: 1) Level pengayaan uranium. Hambatan terbesar untuk memproduksi senjata nuklir adalah memperoleh jumlah material nuklir level senjata (*fissile material weapon grade*). 2) Kapasitas pengayaan. Iran memiliki dua fasilitas pengayaan uranium yaitu Natanz dan Fordow. 3) Stok uranium dimana Iran mendapat

pembatasan jumlah stok uranium yang diperkaya pada level rendah yaitu 300 kilogram uranium hexafluoride pada level 3.67 persen selama 15 tahun. 4) Stok plutonium. Iran masih jauh dari kemampuan memproduksi senjata berbasis plutonium dibandingkan uranium. 5) Pengawasan. Perjanjian nuklir Iran mengatur pengawasan oleh lembaga atom internasional atau *International Atomic Energy Agency* (European Parliament, 2015).

Tujuan dari JCPOA adalah untuk memperlambat kemajuan Iran menuju pembangunan senjata nuklir dengan mengurangi atau menghentikan sama sekali kegiatan pengayaan uranium tertentu. JCPOA membatasi konstruksi sentrifugal Iran, aktivitas terkait air berat, dan kepemilikan produksi plutonium dan uranium tingkat senjata. Masalah utama yang dimiliki negara-negara dengan perjanjian ini adalah perjanjian ini tidak mencakup pengujian rudal. Iran terus menguji coba rudal, tidak hanya memperburuk Amerika Serikat tetapi juga PBB dan negara-negara lain yang terlibat dalam JCPOA karena rudal adalah setengah dari apa yang dibutuhkan untuk memiliki senjata nuklir yang mengancam negara lain, hal ini menunjukkan bahwa Iran mungkin menggunakan program nuklirnya untuk tujuan tidak damai.

Karakteristik Kebijakan Luar Negeri Tiongkok

Ada sebuah terminologi atau teori yang disebutkan oleh pemimpin terdahulu Tiongkok, yakni Deng Xiaoping, dimana Deng Xiaoping mengatakan bahwa tidak masalah bahwa itu kucing hitam atau kucing putih, selama kucing itu menangkap tikus, maka itu adalah kucing yang baik. Dengan kata lain, tidak peduli apakah itu ekonomi terencana atau ekonomi pasar, ekonomi hanyalah alat untuk mengalokasikan sumber daya – tidak ada hubungannya dengan sistem politik (Chunying & Zhifu, 2018). Seiring dengan berjalannya waktu, Tiongkok menerapkan terminologi ini sebagai sebuah bentuk diplomasi yang terkenal dengan nama “*Black cat, white cat diplomacy*” dan pengimplementasiannya tidak lagi hanya sebatas sistem ekonomi. Tiongkok menerapkan logika Deng ini terhadap negara-negara di sekitarnya: tidak masalah jika negara itu negara demokratis atau zalim, selama mereka mengamankan kepentingan Tiongkok (Liao, 2009).

Merujuk kepada penelitian Mikael Weissmann (2015) yang berjudul “*Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer*” “*Striving for Achievement*” menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok memiliki keterkaitan dengan menalitis

superior menjadi “*Middle Kingdom*” dengan hak alami untuk memerintah dunia. Pemikiran kebijakan luar negeri Tiongkok terkait erat dengan persepsi Tiongkok. Pada intinya adalah persepsi identitas – cara cendekiawan, akademisi, dan pembuat kebijakan Tiongkok berpikir tentang Tiongkok. Sejatinya terdapat 3 tujuan di dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Yang secara resmi didefinisikan sebagai 1) stabilitas politik dalam negeri; 2) keamanan berdaulat, integritas teritorial dan persatuan nasional; 3) ekonomi dan sosial Tiongkok yang berada di dalam perkembangan berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa karakteristik kebijakan luar negeri Tiongkok akan berkaitan dengan sumber daya alam di luar negeri. Hal ini kemudian memiliki keterkaitan dengan hubungan bilateral yang tercipta antara Tiongkok dan Iran. Seperti yang diketahui bahwa Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak, dan Tiongkok telah mengimpor minyak dari Iran untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya serta menjauhkan Tiongkok dari kelangkaan minyak. (Weissmann, 2015).

Hubungan Diplomati Tiongkok dan Iran Sebelum Penjatuhan Sanksi JCPOA

Tiongkok dan Iran memiliki beberapa pandangan baik dalam sisi praktis dan ekonomi, yang telah membawa mereka ke dalam kerja sama yang erat selama tiga dekade terakhir. Ketika industri pertahanan Tiongkok yang modern sedang mencari pasar ekspor, Iran menjadi pembeli utama senjata konvensional buatan Tiongkok selama Perang Iran-Irak yang berlarut-larut pada 1980-an. Pada 1980-an dan 1990-an, program teknologi industri dan pertahanan Tiongkok yang paling maju, dalam energi nuklir dan produksi rudal, memberikan bantuan langsung kepada Iran. Bantuan Tiongkok selama periode ini merupakan faktor penting dalam upaya Iran untuk memulai kembali program nuklirnya setelah revolusi 1979. Penjualan Tiongkok yang dilaporkan ke Iran dari bahan baku uranium heksafluorida untuk uranium yang diperkaya dan penjualan tidak langsung rudal antikapal HY-2 “Silkworm” melambangkan era kerja sama antara Tiongkok dan Iran (Davis, et al, 2013).

Tiongkok juga menjadi *supplier* bagi persenjataan Iran dalam masa perang Iran-Irak. Berdasarkan data dan penelitian dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), selama tahun 1982 hingga 2004, Tiongkok menyuplai sekitar 3.8 miliar dollar kepada Iran dalam bentuk senjata konvensional, dengan rata-rata sebesar 171 miliar dollar AS per tahun nya. Pada awal 1990-an, kerjasama nuklir yang lebih langsung sedang berlangsung saat Tiongkok bersiap untuk menjual dua reaktor tenaga nuklir 300 megawatt (MW) kepada

Iran. Meskipun, setelah komitmen 1997 kepada Presiden AS Clinton oleh Presiden Tiongkok Jiang Zemin, Tiongkok menghentikan bantuan lebih lanjut untuk program nuklir Iran—termasuk keterlibatannya di sektor tenaga nuklir sipil—dan menghentikan penjualan rudal lengkap, Iran sekarang menuai “pengembalian.” pada investasi Tiongkok sebelumnya (Davis, et al, 2013).

Kompleksitas hubungan Tiongkok dan Iran serta pengaruh sanksi dari Amerika Serikat dan mayoritas negara di Eropa Barat telah terjadi bahkan sejak beberapa dekade sebelum penjatuhan sanksi dalam kesepakatan JCPOA. Perubahan hubungan diplomatic Tiongkok dan Iran setelah adanya JCPOA akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

Hubungan Diplomatik Tiongkok Dan Iran Pasca Penjatuhan Sanksi Ekonomi dalam Kesepakatan JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dimulai pada bulan Juli 2015 ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran internasional tentang program nuklir Iran dan masa depan hubungan Tiongkok-Iran. Berdasarkan kesepakatan itu, Iran diperkirakan akan membatasi pengayaan uraniumnya dan membuat perubahan lain pada program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi internasional (Wuthnow, 2016). Tiongkok berperan penting dalam membantu Iran keluar dari isolasi internasional dan bergabung kembali dengan ekonomi global melalui JCPOA, menetapkan dirinya sebagai penengah antara Amerika Serikat dan Iran selama negosiasi P5+1. Beijing telah menempatkan sebagai prioritas utama untuk mencegah konfrontasi militer antara Iran dan Amerika Serikat, atau Israel, yang menurut perhitungannya akan menjadi bencana tidak hanya bagi Iran, tetapi juga bagi kepentingan Tiongkok di wilayah tersebut (Garver, 2016).

Adanya peningkatan ketegangan antara AS dan Iran sejak negara itu meninggalkan JCPOA pada 2018 memberikan pengaruh terhadap hubungan Tiongkok dan Iran. Dalam hal ini, Tiongkok tetap menjadi pendukung kuat kesepakatan JCPOA. Hal ini diperjelas dengan adanya pertemuan rutin antara pemerintah Tiongkok dan Iran yang membahas tentang masalah nuklir. Namun, sanksi AS menimbulkan masalah bagi hubungan Tiongkok-Iran, terutama dalam hal ekspor minyak mentah dan investasi Tiongkok di Iran. Tiongkok memainkan peran penting dalam meyakinkan para pemimpin Iran tentang berbagai manfaat—terutama pembangunan ekonomi dengan bantuan Tiongkok yang substansial—yang akan

diperoleh Iran dengan menerima kekhawatiran internasional atas program nuklirnya. Dengan mengamankan pengakuan internasional atas 'hak' Iran untuk memperkaya uranium, Beijing menunjukkan kepada Teheran pengaruhnya yang semakin besar dan kesediaannya untuk memainkan peran yang lebih aktif di Timur Tengah (Garver, 2016).

JCPOA akan memiliki efek langsung dan tidak langsung pada hubungan Tiongkok-Iran. Secara langsung, pencabutan sanksi terkait nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan AS akan meningkatkan peluang bagi perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi dan berdagang dengan Iran. Ini sangat relevan dengan sektor energi, di mana perusahaan minyak nasional Tiongkok (NOC) sebelumnya memperlambat kemajuan mereka ke pasar Iran untuk menghindari sanksi sekunder AS (Wuthnow, 2016).

Dampak JCPOA terhadap hubungan bilateral Tiongkok – Iran cukup kompleks dan rumit untuk dijelaskan. “Pergeseran” Tiongkok ke Iran telah mengguncang kawasan dan mengancam kepentingan Amerika Serikat. Tiongkok dilaporkan menjadi lebih aktif dalam putaran terakhir pembicaraan di Wina yang bertujuan untuk memulihkan JCPOA, yang sering disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran secara informal. Sementara itu, Tiongkok telah meningkatkan impor minyaknya dari Iran dan telah menawarkan dukungan retorik untuk posisi Iran melawan Amerika Serikat. Namun, terlepas dari semua peristiwa yang terjadi terkait dengan JCPOA, hubungan antara Tiongkok – Iran menghasilkan batasan yang signifikan terhadap kerja sama Tiongkok – Iran.

Kepentingan Nasional Tiongkok terhadap Iran

Kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu kekuatan dunia, telah meningkatkan pengaruh dan partisipasinya dalam masyarakat internasional, terbukti dengan partisipasinya dalam beberapa perjanjian multilateral seperti JCPOA (Maioli, 2021). Hubungan Tiongkok-Iran cenderung memiliki masa lalu sejarah yang tidak terlalu rumit, sebagian besar merupakan hasil dari kebijakan Tiongkok yang tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dengan demikian, pendekatan Tiongkok yang didominasi secara finansial terhadap kebijakan luar negeri cocok untuk menjadi aliansi bagi Iran. Pada tahun 2015, dilaporkan bahwa Iran menyediakan sebelas persen dari impor minyak Tiongkok dan Tiongkok adalah pembeli minyak terbesar Iran (Larkins, 2017).

Kepentingan Tiongkok di Timur Tengah tetap tinggi dalam agenda negara, ikatan ekonomi yang ada, serta ketergantungan Tiongkok pada impor energi untuk kawasan, dan ambisi globalnya menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan strategis dunia untuk raksasa Timur (Maioli, 2021). Kerjasama strategis antara Iran dan Tiongkok ini tergambar dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi yang menyatakan bahwa Iran dan Tiongkok akan menjalin kerjasama strategis yang komprehensif, permanen, dan tidak dipengaruhi oleh situasi Iran yang sedang berada dibawah sanksi. Iran adalah pengeksport minyak terbesar kedua di Tiongkok setelah Arab Saudi dan tetap menjadi sumber energi yang konsisten (Holmquist dan Englund, 2020, dalam Maioli, 2021).

Iran adalah pengeksport minyak terbesar kedua di Tiongkok setelah Arab Saudi dan tetap menjadi sumber energi yang konsisten. Sebelum penandatanganan JCPOA, pada tahun 2014, Iran menyumbang 10% dari total impor minyak Tiongkok. Sejak penandatanganan JCPOA, Tiongkok tetap menjadi pola perdagangan terbesar Iran dan pelanggan minyak utamanya, menyumbang 26% dari total ekspor Iran (Holmquist dan Englund, 2020, dalam Maioli, 2021).

Selain itu, hal yang sangat signifikan adalah investasi Tiongkok dalam infrastruktur energi Iran. Pada tahun 2004, perusahaan China, Sinopec, berkomitmen untuk menginvestasikan \$100 miliar di Iran untuk memodernisasi infrastruktur Iran yang sudah ketinggalan zaman dan untuk mengembangkan ladang minyak Yadavarian. Tiongkok telah menjadi mitra Iran yang paling berharga dalam hal pengembangan sektor energinya. Dalam perjalanannya, beberapa proyek yang dilakukan antara Iran dan Tiongkok pada periode 2009 dan 2012, seperti kesepakatan 2009 antara CNPC dan Iran, untuk investasi di ladang gas South Pars Phase 11, senilai \$ 4,7 miliar dan kesepakatan Cina \$ 2,5 miliar 2011 untuk mengembangkan ladang minyak di Azadegan Selatan dihalangi oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan pada 2012, yang menahan Tiongkok untuk melanjutkan proyek investasinya. (Scobell dan Nader, 2016 dalam Maioli, 2021).

Mengenai Iran, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yang melibatkan baik hubungan bilateral kedua negara, relevansinya bagi Tiongkok, serta peran yang dimainkan Iran dalam strategi kebijakan luar negeri Tiongkok secara keseluruhan, terutama mengenai ambisi global Tiongkok yang semakin besar (Scobell dan Nader, 2016, dalam

Maioli, 2021). Tingkat pemahaman diperlukan untuk menjelaskan sikap Tiongkok terhadap JCPOA dan kelangsungannya. Pertama, dari sisi bilateral, hubungan kedua rezim selalu diwarnai dengan kemitraan ekonomi dan politik. Iran telah menjadi sumber minyak dan gas alam yang cukup besar sejak meningkatnya permintaan China untuk barang-barang tersebut. Sejak 2011 Tiongkok telah menjadi importir minyak terbesar dari Timur Tengah, tetapi hubungan dekat dengan rezim telah terjalin sejak Tiongkok menjadi importir bersih pada 1990-an (Maioli, 2021).

Pertimbangan kerjasama Iran-Tiongkok juga dipengaruhi oleh keluarnya AS dari JCPOA. Penarikan AS dari JCPOA atau kesepakatan nuklir Iran pada Selasa, 8 Mei 2018, di mana Trump menyampaikan bahwa AS tidak dapat mencegah pemboman nuklir Iran di bawah struktur lapuk dari perjanjian JCPOA. Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, dengan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA ini, Trump juga mengumumkan bahwa Trump akan kembali menerapkan sanksi terhadap sektor minyak Iran, yang telah dicabut sebagai bagian dari perjanjian. JCPOA sendiri sering menjadi tolok ukur keberhasilan hubungan multilateral di anarkisme sistem internasional, khususnya di bidang non-proliferasi nuklir, untuk mengurangi konflik dalam skala global. Di sisi lain, wilayah Timur Tengah memiliki pandangan bahwa perjanjian JCPOA akan melegitimasi program nuklir Iran dan selanjutnya melegitimasi pengaruh dan kekuatan Iran di kawasan (Dyujandi, Brahmantika, & Tarigan, 2021).

Keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA telah membawa signifikansi kepada hubungan bilateral antara Tiongkok dan Iran. Iran kemudian kembali menerapkan “Melihat ke Timur” yang mana ini berkaitan dengan Tiongkok. Tiongkok sendiri kemudian melihat sebuah kesempatan di dalam mempererat hubungannya dengan Iran ketika Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA. Dengan begitu, Tiongkok bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan hubungan bilateralnya dengan Iran, dan juga mengembangkan hubungan bilateralnya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah (Figueroa, 2022).

Prediksi akan adanya investasi Tiongkok senilai \$120 miliar dalam meningkatkan infrastruktur transportasi dan manufaktur Iran, yang juga dapat dimuat ke dalam periode lima tahun pertama dan ditambahkan ke setiap periode berikutnya. Perjanjian yang diperbarui juga mencakup manfaat bagi perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Iran. Perusahaan-

perusahaan Tiongkok akan diberikan penolakan pertama untuk menawar setiap pengembangan ladang minyak dan gas yang baru, terhenti, atau belum selesai. Mereka juga akan memiliki penolakan pertama pada peluang untuk terlibat dengan proyek petrokimia di negara ini, termasuk penyediaan teknologi, sistem, bahan proses, dan personel (Chaziza, 2019).

Secara signifikan, perjanjian yang diperbarui mencakup penyediaan hingga 5.000 personel keamanan Tiongkok di Iran untuk melindungi aset Tiongkok. Akan ada personel dan material tambahan yang tersedia untuk melindungi transit pasokan minyak, gas, dan petrokimia dari Iran ke Tiongkok, jika perlu, termasuk melalui Teluk Persia. Tiongkok juga akan dapat membeli produk minyak, gas, dan petrokimia apa pun dengan jaminan diskon minimal 12% terhadap harga rata-rata bergulir enam bulan dari produk *benchmark* yang sebanding, ditambah 6-8% dari metrik tersebut untuk kompensasi yang disesuaikan dengan risiko (Chaziza, 2019) oleh karena itu, peran Tiongkok diyakini telah berubah dari peran peserta menjadi pendekatan yang lebih aktif dalam negosiasi JCPOA sejak Xi Jinping menjadi Presiden dan Sekretaris Jenderal. Johanson (2019 dalam Keller, 2020) menyatakan bahwa peran Tiongkok ini selain berkaitan dengan kepentingan China di Iran, namun juga berfokus pada daya tarik China untuk dilihat sebagai “kekuatan yang bertanggung jawab” dan peserta aktif dalam komunitas internasional. China memainkan peran penting selama negosiasi perjanjian dan setelahnya, sementara AS juga merupakan pemain kunci untuk JCPOA (Keller, 2020).

Selain hubungan bilateral kedua negara, Iran memainkan peran penting dalam strategi global Tiongkok. Ketika negara itu mencoba untuk memberikan lebih banyak pengaruh di luar negeri, seperti yang tercermin dari OBOR/BRI, Timur Tengah telah menjadi lahan subur bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh kebijakan luar negeri mereka. Namun, hubungan dekat yang dinikmati kedua negara juga menjadi sumber ketegangan dengan sekutu lain di kawasan itu. Pertama, dalam hal peran yang dimainkan Iran dalam strategi kebijakan luar negeri Tiongkok, terlihat bahwa kedua negara menikmati tingkat pemahaman tertentu dalam hal posisi mereka di dunia. Terutama, Iran telah dituntun untuk menganggap Tiongkok sebagai aktor unik di kancah internasional, independen dari barat dan, sebagai rezim non-demokratis, yang sangat menentang pendekatan barat terhadap kebijakan luar negeri.

Persepsi ini telah menumbuhkan pandangan positif oleh orang Iran terhadap Cina (Maioli, 2021).

Kepentingan Tiongkok pada aspek ekonomi berasal dari ketergantungannya yang meningkat pada minyak dan gas Timur Tengah. Ekonomi Tiongkok terus tumbuh dalam beberapa dekade terakhir, tujuan kebijakan luar negerinya selalu dikaitkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan standar hidup penduduk Tiongkok yang besar, sehingga mengurangi prospek ketidakpuasan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya pekerjaan. Oleh karena itu, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di sektor energi, telah menjadi inti dari kebijakan luar negeri dan dalam negeri China (Monshipouri, & Heiran-Nia, 2020).

National interest atau kepentingan nasional adalah faktor penting dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara, termasuk Tiongkok. Iran, menjadi faktor yang dirasa cukup penting, meskipun masih banyak faktor yang ‘menghalangi’ kepentingan Tiongkok di Iran. Dilihat dari perspektif *national interest* yang terbagi atas kepentingan di bidang keamanan, komunitas, dan ekonomi. Kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Iran merupakan sebuah kerja sama atas dasar saling membutuhkan. Hal ini sendiri terlihat dari sebagaimana yang dipaparkan oleh Dalga (Khatinoglu, 2022), bahwa pada 2021 Tiongkok melaporkan telah melakukan impor sebanyak \$6,5 miliar dari Iran, di mana mayoritas produk yang diimpor oleh Tiongkok terkait dengan minyak yang dimiliki oleh Iran. Selain itu disebutkan juga bahwa harga rata-rata minyak Iran diyakini \$70 per barel dan Tiongkok membeli lebih dari 300 juta barel, yang akan membuat total lebih dari \$20 miliar.

Apa yang dilakukan oleh Tiongkok dengan membentuk sebuah kemitraan strategis dengan Iran merupakan sebuah bentuk nyata dari bagaimana Tiongkok berusaha untuk menjaga kepentingan nasionalnya, dalam hal ini adalah untuk memenuhi pasokan minyak domestik. Bukannya tidak mungkin bagi Tiongkok untuk mendapatkan pasokan minyak di negara lain, hanya saja, membangun sebuah kemitraan strategis dengan Iran di tengah-tengah sanksi yang diberikan kepada Amerika Serikat merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Tiongkok yang lainnya, terlepas dari tujuan Tiongkok yang ingin memenuhi kebutuhan terkait dengan permintaan minyak di dalam negeri. Dilansir dari Geranmayeh dalam *European Council on Foreign Relations* (Geranmayeh, 2020)

kesepakatan yang dirancang oleh Tiongkok dan Iran merupakan sebuah kesepakatan untuk membuka jalan bagi investasi Tiongkok yang cukup besar di sektor strategis penting Iran, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, pariwisata, dan perawatan kesehatan. Jika Tiongkok mampu untuk merealisasikan apa yang ingin dicapai oleh Tiongkok di Iran, maka ini akan memberikan Tiongkok sebuah kekuatan baru.

Kepentingan nasional Tiongkok, jika mengutip kerangka yang dijabarkan oleh Morgenthau ‘setiap tindakan politik diarahkan untuk mempertahankan, meningkatkan, atau mendemonstrasikan kekuasaan negaranya’ maka Tiongkok berusaha untuk mendemonstrasikan kekuasaan negaranya. Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang memiliki *power*, di mana biasanya negara-negara lain akan tunduk kepada Amerika Serikat ketika Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi, maka mayoritas negara yang ada di dunia tidak akan bertindak lain dari yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Namun, Tiongkok memutuskan untuk menjalin kemitraan strategis dengan Iran ketika Iran tengah dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat. Di sini dapat dilihat bahwa Tiongkok ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki kepada dunia, di mana secara tidak langsung Tiongkok ingin mengatakan kepada dunia bahwa Tiongkok memiliki kekuatan untuk melawan keputusan Amerika Serikat dengan membuat kemitraan strategis dengan Iran.

Meskipun Tiongkok adalah salah satu negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran (karena termasuk didalam DK PBB), namun Tiongkok sebagai negara memiliki kepentingan yang cukup serius dan akhirnya mengeluarkan sikap dan kebijakan untuk tetap bekerjasama dengan Iran. Sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara anggota JCPOA ini dapat diimplementasikan secara berbeda, tergantung kepentingan negara tersebut terhadap Iran. Tiongkok yang memiliki kepentingan dengan Iran, melihat Iran Deal atau Nuclear Deal dalam JCPOA ini tidak menjadi hambatan bagi Tiongkok untuk tetap melakukan kerjasama dengan Iran, khususnya di bidang ekonomi sebagai sektor utama kekuatan Tiongkok di mata global saat ini. Iran adalah bagian dari *global strategy* Tiongkok yang ingin memajukan negaranya melalui skema ekonomi seperti *Belt and Road Initiative*, kerjasama bilateral dengan Iran di bidang ekonomi dan energi, dan secara tidak langsung juga melakukan *counter* terhadap pengaruh AS di Iran. Oleh karena itu, faktor kepentingan nasional Tiongkok terutama dalam bidang ekonomi menjadi kunci utama kebijakan politik luar negeri Tiongkok yang tetap menjalin kerjasama dengan Iran, meskipun Iran berada dibawah sanksi JCPOA.

KESIMPULAN

Suatu negara dalam menjalankan hubungan kerjasama dengan negara lain tentunya memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Hal ini berkaitan dengan kepentingan domestik dari suatu negara untuk dapat bertahan hidup. Kepentingan nasional atau *national interest* ini memiliki tiga kepentingan vital yakni kepentingan dalam bidang keamanan, ekonomi, dan pengaruh dalam komunitas internasional; sebagaimana hasil dari penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa dalam menjalin kerjasama dengan negara Iran, Tiongkok memiliki kepentingan nasional yang cukup banyak khususnya dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Sejarah panjang kerjasama Tiongkok dan Iran dibuktikan melalui ekspor-impor dalam bidang energi dan nuklir, persenjataan dan alutsista, serta pengaruh dalam politik internasional dengan menjadikan Iran sebagai aliansi yang memiliki ketegangan dengan Amerika Serikat yang merupakan ‘lawan’ Tiongkok menjadikan posisi Iran dinilai cukup strategis bagi Tiongkok. Pertimbangan posisi Iran inilah yang menyebabkan Tiongkok masih tetap melakukan kerjasama dengan Iran meskipun Iran berada dibawah sanksi JCPOA. Kepentingan nasional Tiongkok berada diatas kesepakatan *Nuclear Deal* yang menjatuhkan sanksi embargo terhadap Iran. Tiongkok, dalam hal ini, justru meraih keuntungan dengan embargo yang dilakukan oleh negara lain (Uni Eropa dan AS) dan memberikan peluang lebih besar bagi Tiongkok untuk menanamkan investasi dalam sektor energi minyak bumi di Iran.

Singkatnya, penetapan sanksi oleh DK PBB kepada Iran atas kepemilikan nuklirnya melalui JCPOA tidak hanya menyurutkan langkah Tiongkok yang memiliki agenda untuk menyebarkan pengaruhnya dalam dunia global khususnya terhadap Iran yang memiliki posisi strategis di kawasan Timur Tengah. Tiongkok yang sedang gencar untuk menjalankan skema OBOR/BRI-nya tentu ingin menjadikan Iran sebagai *partner* kerjasamanya dalam bidang ekonomi yang akan mempermudah akses Tiongkok terhadap sumber energi minyak bumi yang diimpor dari Iran. Meskipun demikian, Tiongkok juga harus tetap menjaga relasi dengan negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah agar kepentingan Tiongkok di kawasan tersebut tetap terjaga dan memberikan keuntungan bagi Tiongkok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing 1, Fendy E. Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Muhammad Arief Zuliyani, S.IP, LL.M selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Affandi, R. M., & Yulianti, D. (2018). Strategi Soft Power Dalam Ekspansi China di Timur Tengah. Studi Kasus Kerjasama China-Iran. *MANDALA: Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2).
- BBC. (2018, November 3). *Trump Administration to reinstate all Iran sanctions*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46071747>
- Brzoska, M. (2014). *The Power and Consequences of International Sanctions*. Retrieved from E-International Relations: <https://www.e-ir.info/2014/05/19/the-power-and-consequences-of-international-sanctions>
- Carter, E. (2011). Economic Sanctions . *Oxford Public International Law* , 2.
- Chunying, Z., & Zhifu, S. (2018). *Chinese Terminology: Black Cat White Cat*. Retrieved from CGTN: https://news.cgtn.com/news/3d3d414d7741544f30457a6333566d54/share_p.html diakses Desember 2022
- Dunne, T., & Schmidt, B. C. (2005). Realism. In J. Baylis, & S. Smith (Eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 3rd Ed. Oxford: Oxford University Press.
- European Parliament. (2015). *Joint Comprehensive Plan of Action*. Retrieved from European Parliament: <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf> diakses Desember 2022
- Garver, J. (2016). China and Iran: An Emerging Partnership Post-Sanction. *Middle East Institute Policy Focus Series*.
- Geranmayeh, E. (2020). *A Pragmatic Partnership: Why China and Iran Try to Collaborate*. Retrieved from European Council on Foreign Relations: https://ecfr.eu/article/commentary_a_pragmatic_partnership_why_china_and_iran_try_to_collaborate/

- Johanson, D. (2019). Becoming a 'Responsible Power?': China's New Role During the JCPOA Negotiations. *E-Relations*.
- Katz, D. (2019). Despite sanctions, China is still doing (some) business with Iran . *Atlantic Council*.
- Khatinoglu, D. (2022). *China Grossly Underreported Oil and Other Imports From Iran*. Retrieved from Iran Intl: <https://www.iranintl.com/en/202202208353>
- Liao, W. (2009). *China's Black Cat, White Cat Diplomacy*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2009/07/10/chinas-black-cat-white-cat-diplomacy/> diakses Desember 2022
- Miaoli, V. (2021). The Future of the JCPOA: The interest behind the 2015 deal and possible strategies for a new agreement. *Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali* .
- Nainggolan, P. (2015). Kesepakatan Nuklir Iran dan Implikasinya. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 7(15), 5-8.
- Pham, J. P. (2015). What Is in the National Interest? Hans Morgenthau's Realist Vision and American Foreign Policy. *American Foreign Policy Interest*, 37(4), 187-193.
- Vakil, S., & Quilliam, N. (2019). *Getting to a New Iran Deal*. Retrieved from Chatam House: <https://www.chathamhouse.org/2019/10/getting-new-iran-deal/2-road-jcpoa-brief-history>
- Weismann, M. (2015). Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer”Striving for Achievement". *Journal of China and International Relations*, 3(1), 151-166.
- Wu, C. (2017). Understanding the Structures and Contents of National Interest: An Analysis of Structural Equation Modeling. *The Korean Journal of International Studies*, 15(3), 391-420.
- Wuthnow, J. (2016). Posing Problems Without an Alliance: China-Iran Relations After the Nuclear Deal. *Strategic Forum National Defense University* .